



P E M E R I N T A H
P R O V I N S I K A L I M A N T A N T I M U R

ANALISIS KETIMPANGAN WILAYAH

Provinsi Kalimantan Timur

(Bab I dan Bab II)



Semester I Tahun 2019

KATA PENGANTAR

Tingginya kontribusi ekonomi Kalimantan Timur terhadap perekonomian Kalimantan tidak menjamin pemerataan pembangunan yang ada di wilayah Kalimantan Timur. Maka dari itu, pelaksanaan pembangunan yang merata di seluruh daerah dilakukan dalam rangka mengurangi kesenjangan antar wilayah. Hal ini berkaitan pula dengan beberapa indikator makro seperti laju pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran, dan tingkat kemiskinan.

Publikasi “Analisis Ketimpangan Wilayah Provinsi Kalimantan Timur” disusun untuk melihat kondisi ketimpangan pendapatan dan antar wilayah di Kalimantan Timur dalam rangka pemerataan wilayah yang telah dilakukan pemerintah. Ketimpangan pendapatan akan diukur dengan menggunakan “Indeks Gini” dan “Indeks *Theil*”, sedangkan ketimpangan antar wilayah akan diukur melalui “Indeks Williamson”.

Buku “Analisis Ketimpangan Wilayah Provinsi Kalimantan Timur “ disusun atas kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur . Hal ini sebagai upaya untuk menyajikan publikasi yang berkualitas terutama dengan basis data yang terpercaya. Sehingga hasil dari analisis dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam perumusan kebijakan pembangunan di Kalimantan Timur.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu proses penyelesaian analisis ini. Besar harapan agar hasilnya dapat bermanfaat dalam proses pembangunan yang dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Timur atau menjadi bahan untuk keperluan monitoring dan evaluasi (*monev*) terhadap berbagai program pembangunan ekonomi yang sedang berlangsung di Kalimantan Timur.

TIM PENYUSUN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan	2
BAB 2 GAMBARAN UMUM KALIMANTAN TIMUR	3
2.1 Kondisi Geografis dan Administrasi.....	3
2.2 Kependudukan	5
2.3 Kondisi Perekonomian.....	6
2.3.1 Pertumbuhan Ekonomi	6
a. PDRB ADHB Kalimantan Timur menurut Lapangan Usaha	8
b. PDRB ADHB Kalimantan Timur menurut Pengeluaran.....	9
c. PDRB ADHB Kalimantan Timur menurut Kabupaten/Kota	10
2.3.2 Kemiskinan.....	11
2.3.3 Ketenagakerjaan	12
2.4 Pembangunan Manusia	14

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1. Kondisi Iklim Kalimantan Timur, 2018	4
2. Tabel 2. Daerah Administrasi Kalimantan Timur, 2018	5
3. Tabel 3. Statistik Kependudukan Provinsi Kalimantan Timur, 2018.....	6
4. Tabel 4. Perkembangan PDRB Kalimantan Timur, 2016-2018.....	7
5. Tabel 5. Kondisi Perekonomian Kalimantan Timur Lapangan Usaha, 2018.....	8
6. Tabel 6. Kondisi Perekonomian Kalimantan Timur Menurut Pengeluaran, 2018.....	10
7. Tabel 7. Kondisi Perekonomian Kalimantan Timur Menurut Kabupaten/Kota, 2018.....	11
8. Tabel 8. Statistik Kemiskinan Kalimantan Timur Menurut Kabupaten/Kota, 2018.....	12
9. Tabel 9. Statistik Ketenagakerjaan Kalimantan Timur, 2017-2018.....	13
10. Tabel 10. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kalimantan Timur Menurut Kabupaten/Kota, 2017-2018	13
11. Tabel 11. Upah Minimum Kerja (UMK) Menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur, 2018	14
12. Tabel 12. Statistik Pembangunan Manusia Kalimantan Timur, 2018.....	15

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1 . Peta Kalimantan Timur 1
2. Gambar 2. Laju Pertumbuhan PDRB Kalimantan Timur, 2014- 2018 7
3. Gambar 3. IPM dan Pertumbuhan IPM Kalimantan Timur..... 15

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam proses pembangunan di suatu wilayah seharusnya pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi merupakan dua tujuan yang harus dapat dicapai secara bersamaan. Pembangunan ekonomi dapat dikatakan berhasil apabila suatu wilayah/daerah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat secara merata. Pertumbuhan ekonomi tanpa adanya pemerataan ekonomi akan memperlebar jurang pemisah antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya (kaya dan miskin) atau antara wilayah yang satu dengan yang lain (maju dan tertinggal). Ketimpangan yang tinggi dapat memunculkan berbagai permasalahan antara lain kecemburuan sosial, kerawanan disintegrasi wilayah dan disparitas ekonomi yang makin lebar dan tajam. Dampak lain seperti peningkatan migrasi dari daerah yang miskin ke daerah yang maju, tingkat kesejahteraan masyarakat menjadi rendah yang terlihat dalam bentuk kecemburuan dan ketidakpuasan masyarakat yang dapat berlanjut menjadi tindak kriminalitas, konflik antar masyarakat, dan dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Ketimpangan antar wilayah juga turut mewarnai dinamika pembangunan manusia di Indonesia. Luasnya wilayah Indonesia dan tidak meratanya pembangunan menyebabkan ketimpangan terjadi, baik antara perkotaan dengan perdesaan, antarpровinsi, antarkabupaten, antara kota dengan kabupaten. Dalam tujuan pembangunan wilayah sampai tahun 2024, Pemerintah Pusat terus berupaya mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Sumatera. Salah satu sasaran yang harus dicapai dalam lima tahun mendatang adalah mengurangi kesenjangan antar wilayah dengan mendorong percepatan pembangunan di Kawasan Timur Indonesia.

Isu strategis yang juga menjadi fokus RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2020-2024 adalah ketimpangan antar provinsi dalam wilayah pulau. Pulau Kalimantan tercatat memiliki ketimpangan yang cukup tinggi. Meskipun ketimpangan belum tentu merefleksikan keberhasilan kebijakan distribusi pembangunan namun tingkat ketimpangan yang rendah dapat menjadi cerminan belum meratanya tingkat pembangunan di seluruh wilayah.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals juga menyinggung mengenai ketimpangan, yakni pada tujuan kesepuluh. Tujuan kesepuluh menyatakan bahwa pada tahun 2030 kesenjangan atau ketimpangan di dalam dan antar Negara semakin berkurang. Kesenjangan yang terjadi dapat mengancam pembangunan sosial maupun ekonomi dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif perlu dilakukan untuk memastikan tersedianya kesempatan yang sama serta menurunkan kesenjangan pendapatan.

Kalimantan Timur merupakan penyumbang hampir 50 persen perekonomian di Pulau Kalimantan. Meskipun demikian pertumbuhan ekonomi tidak sejalan dengan pemerataan

pembangunan yang ada di kabupaten. Terlihat dari masih banyak daerah tertinggal di Provinsi Kalimantan Timur yang sulit untuk akses masuk ke daerah tersebut. Sulitnya akses masuk ke daerah dapat menyebabkan mobilitas barang dan jasa di daerah tersebut terhambat, sehingga akan membuat daerah tersebut semakin tertinggal. Salah satu fenomena tersebut merupakan ketimpangan wilayah antar daerah yang terjadi di Provinsi Kalimantan Timur.

Provinsi Kalimantan Timur memiliki 10 kabupaten/kota dengan karakteristik sumber daya alam yang hampir sama yaitu pada sektor pertanian serta sektor pertambangan dan penggalian. Meskipun memiliki sumber daya alam yang hampir sama tetapi tidak memberikan pendapatan ekonomi yang berbeda. Angka PDRB tahun 2018 yang tinggi di dominasi oleh beberapa kabupaten/kota yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara (25,46 persen), Kabupaten Kutai Timur (19,9 persen), dan Kota Balikpapan (15,09 persen). Sedangkan di Kabupaten Mahakam Ulu angka PDRB tahun 2018 hanya sebesar 0,40 persen dari PDRB Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu persebaran jumlah penduduk juga belum merata di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Dari total penduduk Kalimantan Timur sebanyak 3,6 juta jiwa, hanya 26 ribu jiwa yang berada di Kabupaten Mahakam Ulu (0,70 persen). Perbedaan ini membuat tingkat pertumbuhan pembangunan di masing-masing daerah di Kalimantan Timur berbeda.

1.2 Tujuan

Tujuan dari penulisan analisis ini antara lain :

1. Tersedianya analisis tingkat ketimpangan pendapatan Provinsi Kalimantan Timur
2. Tersedianya analisis mengenai kondisi ketimpangan antar wilayah di Provinsi Kalimantan Timur
3. Mengetahui tipologi ketimpangan wilayah di Provinsi Kalimantan Timur
4. Mengetahui faktor yang berpengaruh terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Kalimantan Timur
5. Mengetahui strategi yang dapat digunakan dapat mengatasi ketimpangan di Provinsi Kalimantan Timur
6. Memberikan rekomendasi mengenai upaya untuk mengatasi ketimpangan wilayah di Provinsi Kalimantan Timur

BAB II GAMBARAN UMUM KALIMANTAN TIMUR

2.1 Kondisi Geografis dan Administrasi



Gambar 1. Peta Kalimantan Timur

Kalimantan Timur adalah Provinsi terluas ketiga di Pulau Kalimantan setelah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, dan terluas keempat di Indonesia yaitu seluas 127.346,92 km². Adapun secara geografis, batas-batas wilayah Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

- Utara : Provinsi Kalimantan Utara dan Negara Malaysia
- Selatan : Provinsi Kalimantan Selatan
- Barat : Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Tengah
- Timur : Laut Sulawesi dan Selat Makassar

Kondisi astronomis Kalimantan Timur pada wilayah Indonesia terletak antara 2° 33' LU - 2° 25' LS dan 113° 44' BT - 119° 00' BT. Mengacu pada letak astronomis ini, Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi yang dilintasi garis khatulistiwa. Dengan demikian bisa dipastikan jika seluruh bagian Provinsi Kalimantan Timur adalah kawasan tropis sehingga cuacanya sangat panas. Suhu di Kaltim berkisar 22 °C – 34 °C dengan kelembaban udara rata-rata berkisar antara 81 – 87 persen. Secara umum, kondisi topografi di Kalimantan Timur berbukit-bukit dengan ketinggian berkisar antara 0 – 2.500 meter diatas permukaan air laut.

Tabel 1. Kondisi Iklim Kalimantan Timur, 2018

Uraian	Stasiun		
	Samarinda	Balikpapan	Tanjung Redeb
(1)	(2)	(3)	(4)
Suhu (⁰ C)			
minimum	21,70	24,10	22,80
rata-rata	27,90	27,30	26,90
maksimum	33,60	31,60	34,00
Kelembaban Udara (%)			
minimum	55	72	48
rata-rata	81	87	87
maksimum	94	97	98
Tekanan Udara (mb)	1 012,00	1 010,70	1 012,00
Kecepatan Angin (m/det)	3,50	3,80	3,70
Curah Hujan (mm)	158,50	232,90	188,30
Penyinaran Matahari (%)	42,9	44,3	45,8

Sumber: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Kalimantan Timur

Pembagian daerah administrasi di Kalimantan Timur dibagi menjadi 10 kabupaten dan kota, 7 kabupaten dan 3 kota. Kabupaten terluas adalah Kutai Timur mencapai 24,38 persen dari luas Kalimantan Timur dan terkecil adalah Bontang yaitu hanya 0,13 persen dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Dari 10 kabupaten/kota terdapat 103 kecamatan dan 1.038 desa/kelurahan. Kabupaten dengan jumlah desa/kelurahan terbanyak terdapat pada Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu sebanyak 237 desa/kelurahan. Sedangkan kabupaten dengan kecamatan terbanyak terdapat di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kutai Timur sebanyak 18 kecamatan. Kabupaten jumlah kecamatan dan desa/kelurahan paling sedikit terdapat di Kota Bontang yaitu hanya terdapat 3 kecamatan dan 15 desa/kelurahan.

Tabel 2. Daerah Administrasi Kalimantan Timur, 2018

Kabupaten/Kota	Ibukota	Luas (km ²)	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Paser	Tanah Grogot	11 096,96	10	144
Kutai Barat	Sendawar	13 709,92	16	194
Kutai Kartanegara	Tenggarong	25 988,08	18	237
Kutai Timur	Sangata	31 051,71	18	141
Berau	Tanjung Redeb	21 735,19	13	110
Penajam Paser Utara	Penajam Paser Utara	2 923,73	4	54
Mahakam Ulu	Long Bagun	19 449,41	5	50
Balikpapan	Balikpapan	512,25	6	34
Samarinda	Samarinda	716,53	10	59
Bontang	Bontang	163,14	3	15
Kalimantan Timur	Samarinda	127 346,92	103	1 038

Sumber: Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 Tanggal 6 Mei 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 90 Tahun 2018 tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun 2018

2.2 Kependudukan

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk (SP) 2010, jumlah penduduk di Kalimantan Timur adalah sebesar 3.047.479 jiwa. Tahun 2018, proyeksi jumlah penduduk Kalimantan Timur adalah sebesar 3.648.835 jiwa. Dengan persentase penduduk laki-laki sebesar 52,43 persen, sedikit lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Jumlah penduduk paling banyak terdapat di Kota Samarinda sebanyak 858.080 jiwa, Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 769.337 jiwa dan Kota Balikpapan sebanyak 645.727 jiwa.

Jika dibandingkan dengan tahun 2017, dimana jumlah penduduk adalah sebesar 3.575.449 jiwa, maka laju pertumbuhan penduduk di Kalimantan Timur sebesar 2,05 persen. Pertumbuhan menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 2,12 persen. Laju pertumbuhan tercepat

adalah di Kabupaten Kutai Timur yaitu 4,09 persen. Hal ini dipacu dengan adanya pertambangan batubara besar di Kabupaten Kutai Timur. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk paling rendah terdapat di Kutai Barat dan Mahakam Ulu yaitu hanya sebesar 0,41 persen dan 0,16 persen, bahkan kedua kabupaten ini pertumbuhan penduduknya masih dibawah 1 persen, sangat rendah sekali.

Di Kalimantan Timur, kota paling padat adalah Kota Balikpapan dengan kepadatan penduduk sebesar 1.279,02 jiwa/km² yang artinya setiap 1 km² wilayah di Kota Balikpapan dihuni oleh sekitar 1.279 jiwa penduduk. Sedangkan wilayah dengan penduduk terjarang adalah di Mahakam Ulu yang angka kepadatan penduduknya hanya 1,36 jiwa/km². Secara umum, kepadatan penduduk di Kalimantan Timur adalah 29,22 jiwa/km², menandakan dengan luas wilayah yang mencapai 128 ribu hektar tersebut penduduk yang bermukim di Kalimantan Timur masih sangat sedikit/jarang.

Tingginya angka kepadatan penduduk di wilayah kota (Samarinda, Balikpapan, Bontang) disebabkan oleh luas wilayah yang terbatas namun wilayah kota umumnya memiliki posisi sebagai pusat pemerintahan. Selain itu, wilayah kota cenderung merupakan pusat aktivitas ekonomi, sehingga memiliki daya tarik tersendiri bagi penduduk untuk migrasi ke kota.

Tabel 3. Statistik Kependudukan Provinsi Kalimantan Timur, 2018

Kabupaten/ Kota	Penduduk			Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	Pertumbuhan Penduduk 2017-2018 (%)
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Paser	148 404	131 571	279 975	25,76	2,1
Kutai Barat	77 998	69 600	147 598	10,8	0,41
Kutai Kartanegara	403 825	365 512	769 337	30,25	2,29
Kutai Timur	195 987	165 683	361 670	12,11	4,09
Berau	121 720	104 789	226 509	10,69	2,68
Penajam Paser Utara	83 281	76 105	159 386	55,04	1,06
Mahakam Ulu	14 017	12 330	26 347	1,36	0,16
Balikpapan	333 347	312 380	645 727	1 279,02	1,53
Samarinda	443 379	414 701	858 080	1 218,05	1,74
Bontang	91 021	83 185	174 206	1 089,38	2,11
Kalimantan Timur	1 912 979	1 735 856	3 648 835	29,22	2,05

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

2.3 Kondisi Perekonomian

2.3.1 Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator untuk melihat kinerja pembangunan perekonomian yang mencerminkan seluruh nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah dalam periode tertentu. PDRB juga merupakan salah satu indikator untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan khususnya Tujuan kedelapan yaitu

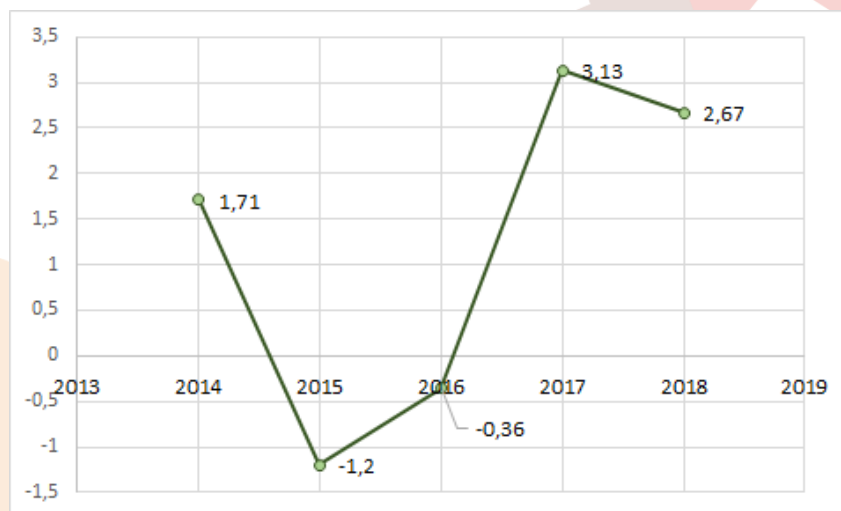
meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.

Tabel 4. Perkembangan PDRB Kalimantan Timur, 2016 – 2018

Uraian	Tahun		
	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)
PDRB adh Berlaku (Miliar Rp)	508 880,2	592 279,9	638 116,9
PDRB adh Konstan 2010 (Miliar Rp)	439 003,8	452 741,9	464 823,5
PDRB per Kapita adh Berlaku (Juta Rp)	145,3	165,7	174,9
PDRB per Kapita adh Konstan 2010 (Juta Rp)	125,4	126,6	127,4

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Pada tahun 2018, besaran PDRB Kalimantan Timur atas dasar harga berlaku sebesar Rp638,12 triliun, lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp592,28 triliun. Untuk PDRB per kapita atas dasar harga berlaku juga mengalami kenaikan sebesar 5,57 persen, dari Rp165,7 juta menjadi Rp174,9 juta.



Gambar 2. Laju Pertumbuhan PDRB Kalimantan Timur, 2014-2018

Sementara itu, laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur selama periode 2014-2018 cukup fluktuatif, menunjukkan tren melambat kemudian merangkak naik. Dari tahun 2014-2015 mengalami perlambatan pertumbuhan, bahkan di tahun 2015 dan 2016 mengalami kontraksi. Pada tahun 2017 pertumbuhan Kalimantan Timur mampu positif sebesar 3,13 dan sedikit melambat di tahun 2018 sebesar 2,67 persen.

a. PDRB ADHB Kalimantan Timur menurut Lapangan Usaha

Pada tahun 2018, struktur perekonomian Kalimantan Timur masih mengandalkan kekayaan sumber daya alam atau sektor primer. Hal ini dilihat dari dominasi lapangan usaha sektor Pertambangan dan Penggalian dengan nominal PDRB sebesar Rp295.764,88 miliar. Diikuti dengan sektor Industri Pengolahan dengan nominal sebesar Rp116.553,43 miliar. Kedua sektor secara bersama menguasai lebih dari 60 persen perekonomian Kalimantan Timur. Sektor Pertambangan dan Penggalian memberikan kontribusi sebesar 46,35 persen terhadap total penciptaan nilai tambah di Kalimantan Timur. Sektor Industri Pengolahan memiliki peranan sebesar 18,27 persen.

Sektor Pertambangan dan Penggalian dan sektor Industri Pengolahan memberikan kontribusi paling tinggi di Kalimantan Timur. Namun peranan kedua sektor ini setiap tahunnya cenderung menurun, seiring dengan semakin berkurangnya sumber daya tidak terbarukan seperti batubara, minyak dan gas. Selain peranan yang cenderung menurun, laju pertumbuhan dari kedua sektor ini paling kecil. Sektor Pertambangan dan Penggalian hanya tumbuh sebesar 1,11 persen pada tahun 2018, sedangkan sektor Industri Pengolahan tumbuh sebesar 0,52 persen.

Tabel 5. Kondisi Perekonomian Kalimantan Timur menurut Lapangan Usaha, 2018

Lapangan Usaha	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (miliar Rupiah)	Kontribusi PDRB (%)			Laju Pertumbuhan (%)
		2016	2017	2018	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	50 262,61	8,22	7,97	7,88	6,27
B. Pertambangan dan Penggalian	295 764,88	43,19	46,32	46,35	1,11
C. Industri Pengolahan	116 553,43	20,63	19,08	18,27	0,52
D. Pengadaan Listrik dan Gas	315,11	0,05	0,05	0,05	9,76
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	293,95	0,05	0,05	0,05	3,67
F. Konstruksi	54 232,42	8,28	7,96	8,50	7,37
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	35 649,55	5,55	5,39	5,59	7,44
H. Transportasi dan Pergudangan	23 517,88	3,71	3,62	3,69	6,34
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6 161,79	0,95	0,93	0,97	9,14
J. Informasi dan Komunikasi	7 989,99	1,30	1,26	1,25	5,04
K. Jasa Keuangan	9 776,48	1,72	1,53	1,53	4,37
L. Real Estate	5 617,37	0,96	0,88	0,88	4,83
M,N. Jasa Perusahaan	1 305,62	0,22	0,21	0,20	4,96
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	12 617,16	2,32	2,03	1,98	2,7
P. Jasa Pendidikan	10 133,79	1,61	1,54	1,59	7,47

Lapangan Usaha	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (miliar Rupiah)	Kontribusi PDRB (%)			Laju Pertumbuhan (%)
		2016	2017	2018	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3 911,00	0,63	0,59	0,61	8,05
R,S,T,U. Jasa Lainnya	4 013,87	0,62	0,60	0,63	9,02
PDRB	638 116,90	100,00	100,00	100,00	2,67

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Adapun dari sektor yang mengalami peningkatan peranan atau kontribusi yaitu sektor Konstruksi yang mengalami peningkatan menjadi 8,5 persen ditahun 2018 yang sebelumnya sempat turun pada tahun 2017 yaitu sebesar 7,96 persen. Penyumbang kontribusi PDRB tertinggi selanjutnya pada sektor Pertanian yaitu sebesar 7,88 persen, namun sektor ini cenderung menurun peranan tiap tahunnya. Walaupun setiap tahun menurun peranannya tetapi pertumbuhan sektor Pertanian masih tinggi yaitu sebesar 6,27 persen.

Kemudian sektor-sektor berkembang dengan pertumbuhan tinggi tetapi kontribusinya rendah yaitu sektor Pengadaan Listrik dan Gas yang pertumbuhannya sebesar 9,76 persen, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 9,14 persen dan sektor Jasa Lainnya sebesar 9,02 persen.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya pertumbuhan perekonomian Kalimantan Timur menurun, tahun 2017 pertumbuhan sebesar 3,13 persen, sedangkan tahun 2018 menurun menjadi 2,67 persen. Jika diamati dalam kurun waktu 2016 sampai dengan 2018, secara umum kinerja ekonomi Kalimantan Timur mengalami perlambatan. Hal ini dikarenakan anjloknya harga komoditas sumber energi di pasar global yang menjadi pemicu perlambatan ekonomi secara keseluruhan.

b. PDRB ADHB Kalimantan Timur menurut Pengeluaran

Sebagai wilayah yang mengandalkan kinerja dari komoditas primer, perekonomian Kalimantan Timur pada tahun 2018 sangat dipengaruhi oleh kinerja ekspor komoditi migas dan batubara. Pada tahun 2018, peranan komponen ekspor luar negeri dalam penghitungan PDRB atas dasar harga berlaku dari sisi pengeluaran mencapai 39,93 persen dengan nominal PDRB sebesar Rp 254.778,03 miliar. Untuk pertumbuhan volume ekspor luar negeri mengalami pertumbuhan negatif sebesar 3,71 persen.

Kontribusi impor luar negeri Kalimantan Timur mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2017 kontribusi PDRB impor sebesar 11,68 persen menjadi 12,44 persen di tahun 2018. Demikian juga pertumbuhan komponen tersebut tumbuh positif 9,39 persen.

Tabel 6. Kondisi Perekonomian Kalimantan Timur menurut Pengeluaran, 2018

Komponen	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (miliar Rupiah)	Kontribusi PDRB (%)			Laju Pertumbuhan (%)
		2016	2017	2018	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Rumah Tangga	103 435,77	17,99	16,34	16,21	2,81
Konsumsi LNPRT	2 973,20	0,48	0,44	0,47	9,41
Konsumsi Pemerintah	23 195,23	4,63	3,56	3,63	8,21
PMTB	173 413,13	28,43	26,09	27,18	7,54
Perubahan Inventori	1 610,95	0,38	0,30	0,25	-15,13
Ekspor Barang dan Jasa	254 778,03	38,81	40,43	39,93	-3,71
Impor Barang dan Jasa	79 397,60	12,79	11,68	12,44	9,39
Net Ekspor Antar Daerah	158 108,19	22,08	24,52	24,78	16,15
PDRB	638 116,90	100,00	100,00	100,00	2,67

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Di antara pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga, Lembaga nonprofit (LNPRT), dan pemerintah di tahun 2018 nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan komponen PDRB dengan nilai terbesar yaitu Rp 103.435,77 miliar atau sebesar 16,21 persen terhadap PDRB Kalimantan Timur. Angka tersebut mengalami peningkatan dari tahun lalu. Sementara itu, pengeluaran pemerintah mengalami peningkatan nilai PDRB.

Untuk komponen pengeluaran, hampir seluruh komponen mengalami pertumbuhan positif, kecuali perubahan inventori dan ekspor barang dan jasa. Pertumbuhan net ekspor antar daerah dan pengeluaran konsumsi LNPRT mengalami pertumbuhan tercepat dibandingkan komponen lainnya, yakni masing-masing sebesar 16,15 persen dan 9,41 persen.

c. PDRB ADHB Kalimantan Timur menurut Kabupaten/Kota

Penyumbang PDRB menurut kabupaten/kota tertinggi adalah dari Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 160.596,04 miliar rupiah atau 25,46 persen dari total PDRB Kalimantan Timur. Kontribusi PDRB Kutai Kartanegara meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 25,2 persen. Disusul oleh Kabupaten Kutai Timur sebesar 125.512,19 miliar rupiah atau 19,9 persen dari PDRB Kalimantan Timur, menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang menyumbang PDRB sebesar 20,14 persen. Sedangkan penyumbang PDRB terendah adalah dari Mahakam Ulu. Hal ini dikarenakan Kabupaten Mahakam Ulu masih baru sehingga belum banyak kegiatan ekonomi yang ada disana. Selain itu, transportasi untuk ke kabupaten ini juga masih susah sehingga pembangunan ekonomi masih kecil.

Tabel 7. Kondisi Perekonomian Kalimantan Timur menurut Kabupaten/Kota, 2018

Lapangan Usaha	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (miliar Rupiah)	Kontribusi PDRB (%)			Laju Pertumbuhan (%)
		2016	2017	2018	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Paser	48 264,56	7,30	7,48	7,65	3,69
Kutai Barat	28 068,65	4,31	4,37	4,45	4,98
Kutai Kartanegara	160 596,04	25,02	25,20	25,46	2,12
Kutai Timur	125 512,19	18,62	20,14	19,90	2,32
Berau	38 977,18	6,03	6,21	6,18	2,04
PPU	8 850,91	1,50	1,44	1,40	1,24
Mahakam Ulu	2 510,51	0,42	0,40	0,40	5,39
Balikpapan	95 162,06	15,69	14,81	15,09	4,97
Samarinda	63 947,54	10,30	9,95	10,14	4,98
Bontang	58 873,09	10,81	10,01	9,33	-4,18
Kalimantan Timur	638 116,90	100,00	100,00	100,00	2,67

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

2.3.2 Kemiskinan

Kemiskinan masih menjadi salah satu isu yang cukup krusial. Bahkan, kemiskinan juga termasuk salah satu indikator dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), dan menjadi tujuan pertama, yaitu mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun. Di Kalimantan Timur, tahun 2018 angka kemiskinan sebesar 6,03 persen, menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 6,19 persen. Hal ini menunjukkan ttingkat kemiskinan di Kalimantan Timur berkurang. Pada tahun 2018, tingkat kemiskinan paling tinggi terdapat di Kabupaten Mahakam Ulu yakni sebesar 11,62 persen. Sedangkan paling rendah terdapat di Kota Balikpapan.

Indeks kedalaman kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh dari rata-rata pengeluaran penduduk. Pada tahun 2018, nilai indeks kedalaman kemiskinan Kalimantan Timur sebesar 0,85 turun dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 0,89. Hal ini menunjukkan ketimpangan pengeluaran semakin menyempit.

Indeks keparahan kemiskinan (P2) merupakan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Pada tahun 2018, nilai indeks keparahan kemiskinan Kalimantan Timur menurun menjadi 0,20 dari 0,21 pada tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin semakin menyempit.

Tabel 8. Statistik Kemiskinan Kalimantan Timur menurut Kabupaten/Kota, 2018

Kabupaten/Kota	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Paser	455 635	25,14	9,03	1,22	0,31
Kutai Barat	517 621	13,49	9,15	1,19	0,26
Kutai Kartanegara	485 435	56,56	7,41	0,95	0,20
Kutai Timur	543 442	33,02	9,22	1,49	0,41
Berau	502 564	11,33	5,04	0,57	0,11
PPU	447 539	11,76	7,40	1,18	0,38
Mahakam Ulu	566 944	3,25	11,62	0,33	0,02
Balikpapan	545 971	17,01	2,64	0,67	0,26
Samarinda	616 365	39,23	4,59	0,49	0,09
Bontang	549 830	8,10	4,67	0,93	0,26
Kalimantan Timur	574 704	218,9	6,03	0,85	0,20
2017	548 094	220,17	6,19	0,89	0,21

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, Survei Sosial Ekonomi Nasional

2.3.3 Ketenagakerjaan

Kelompok penduduk berumur 15 tahun ke atas merupakan kelompok penduduk yang produktif dan memiliki potensial secara ekonomi, sehingga disebut penduduk usia kerja. Penduduk usia kerja di Kalimantan Timur pada tahun 2018 tercatat sebanyak lebih dari 2,6 juta jiwa. Dibandingkan tahun sebelumnya, terdapat peningkatan sebesar 2,69 persen.

Pada tahun 2018, angkatan kerja di Kalimantan Timur sebesar 1,73 juta penduduk usia kerja. Jumlah ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dari sejumlah angkatan kerja tersebut proporsi penduduk yang bekerja ada sebesar 93,4 persen, dan sisanya adalah pengangguran. Pada kelompok bukan angkatan kerja, mengurus rumah tangga memiliki proporsi yang paling besar yaitu mencapai 63,59 persen.

Nilai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menggambarkan persentase jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Tahun 2018, TPAK Kalimantan Timur sebesar 64,99 persen atau 1,73 juta jiwa tergolong pada kelompok angkatan kerja. Dari kelompok bukan angkatan kerja tersebut sebanyak 1,62 juta jiwa aktif bekerja dan sisanya 114,3 ribu jiwa sebagai pengangguran. Menurut kabupaten/kota TPAK tertinggi berada di Kabupaten Kutai Barat yakni 72,65 persen penduduk Kabupaten Kutai Barat tergolong pada kelompok angkatan kerja.

Tabel 9. Statistik Ketenagakerjaan Kalimantan Timur, 2017-2018

Uraian	2017	2018
(1)	(2)	(3)
Penduduk Usia 15 +	2 595 992	2 665 909
Angkatan Kerja	1 654 964	1 732 598
a. Bekerja	1 540 675	1 618 285
b. Pengangguran	114 289	114 313
Bukan Angkatan Kerja	941 028	933 311
a. Sekolah	247 456	238 947
b. Mengurus RT	612 093	593 523
c. Lainnya	81 479	100 841

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus

Dalam bidang ketenagakerjaan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi indikator dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ke 8 (delapan), yaitu terkait pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi. TPT menggambarkan angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar tenaga kerja. Pada tahun 2018, TPT Kalimantan Timur sebesar 6,6, artinya dari 100 orang angkatan kerja ada sekitar 7 orang yang menganggur. Jika dirinci menurut kabupaten/kota, terdapat variasi besaran nilai TPT antar wilayah. Pada tahun 2018, nilai TPT tertinggi adalah Kota Bontang yaitu mencapai 9,61 persen. Sedangkan TPT terendah berada di Kabupaten Mahakam Ulu yaitu sebesar 4,17 persen.

Tabel 10. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kalimantan Timur menurut Kabupaten/Kota, 2017-2018

Kabupaten/Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	
	2017	2018	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Paser	5,54	5,00	62,15	67,22
Kutai Barat	5,87	4,86	66,01	72,65
Kutai Kartanegara	5,72	5,96	62,95	64,36
Kutai Timur	4,61	5,93	66,75	69,4
Berau	6,45	5,62	66,00	67,85
Penajam Paser Utara	4,75	4,76	61,00	64,81
Mahakam Ulu	9,05	4,17	77,12	79

Kabupaten/Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	
	2017	2018	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Balikpapan	10,39	9,52	63,38	64,33
Samarinda	6,19	6,16	63,05	61,32
Bontang	12,44	9,61	64,52	65,16
Kalimantan Timur	6,91	6,6	63,75	64,99

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus

Pada tahun 2018, jika dilihat menurut Upah Minimum Kerja (UMK) di Kalimantan Timur adalah Rp 2.543.332,-. Keseluruhan kabupaten/kota di Kalimantan Timur memiliki angka UMK lebih tinggi dibandingkan dengan UMK Kalimantan Timur. Kabupaten dengan UMK tertinggi adalah Kabupaten Berau yaitu Rp 2.889.009,-. Sedangkan kabupaten dengan UMK terendah di Kaltim adalah Kabupaten Paser dengan angka sebesar Rp 2.580.691,-, walaupun begitu UMK Paser masih diatas UMK Kalimantan Timur.

Tabel 11. Upah Minimum Kerja (UMK) menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur, 2018

Kabupaten/Kota	Upah Minimum Kerja (Rp)
(1)	(2)
Paser	2 580 691
Kutai Barat	2 792 399
Kutai Kartanegara	2 712 491
Kutai Timur	2 678 731
Berau	2 889 009
Penajam Paser Utara	2 789 925
Mahakam Ulu*)	...
Balikpapan	2 618 348
Samarinda	2 654 895
Bontang	2 715 078
Kalimantan Timur	2 543 332

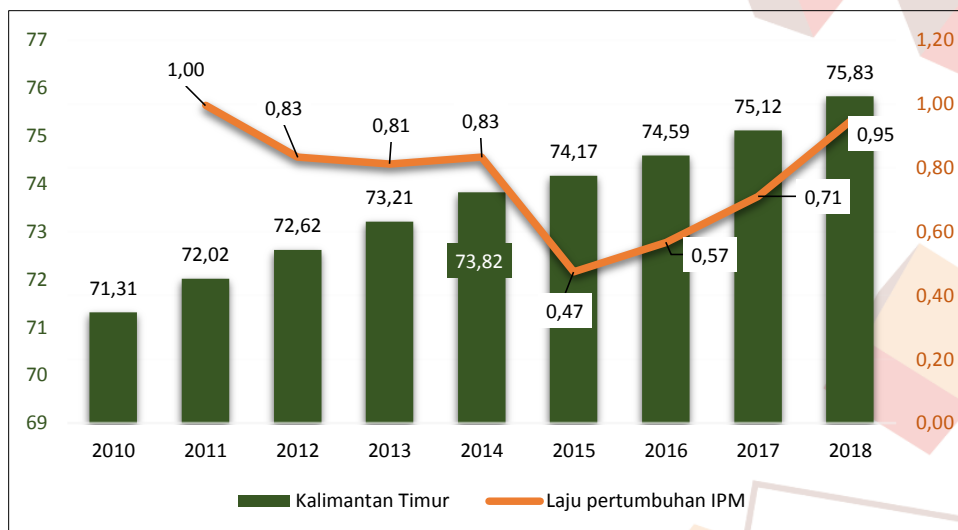
*) Data Mahakam Ulu masih bergabung dengan Kutai Barat

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur

2.4 Pembangunan Manusia

Kemajuan hasil pembangunan manusia secara umum dapat ditunjukkan dengan melihat perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Angka IPM mencerminkan capaian kemajuan di

bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Perkembangan angka IPM di Kalimantan Timur terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, IPM Kalimantan Timur tercatat sebesar 75,83 dan termasuk ke dalam kategori tinggi bersama 2 provinsi lainnya yaitu DKI Jakarta dan DI Yogyakarta. Angka IPM 2018 ini meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 75,12, dengan pertumbuhan sebesar 0,95 persen.



Gambar 3 IPM dan Pertumbuhan IPM Kalimantan Timur

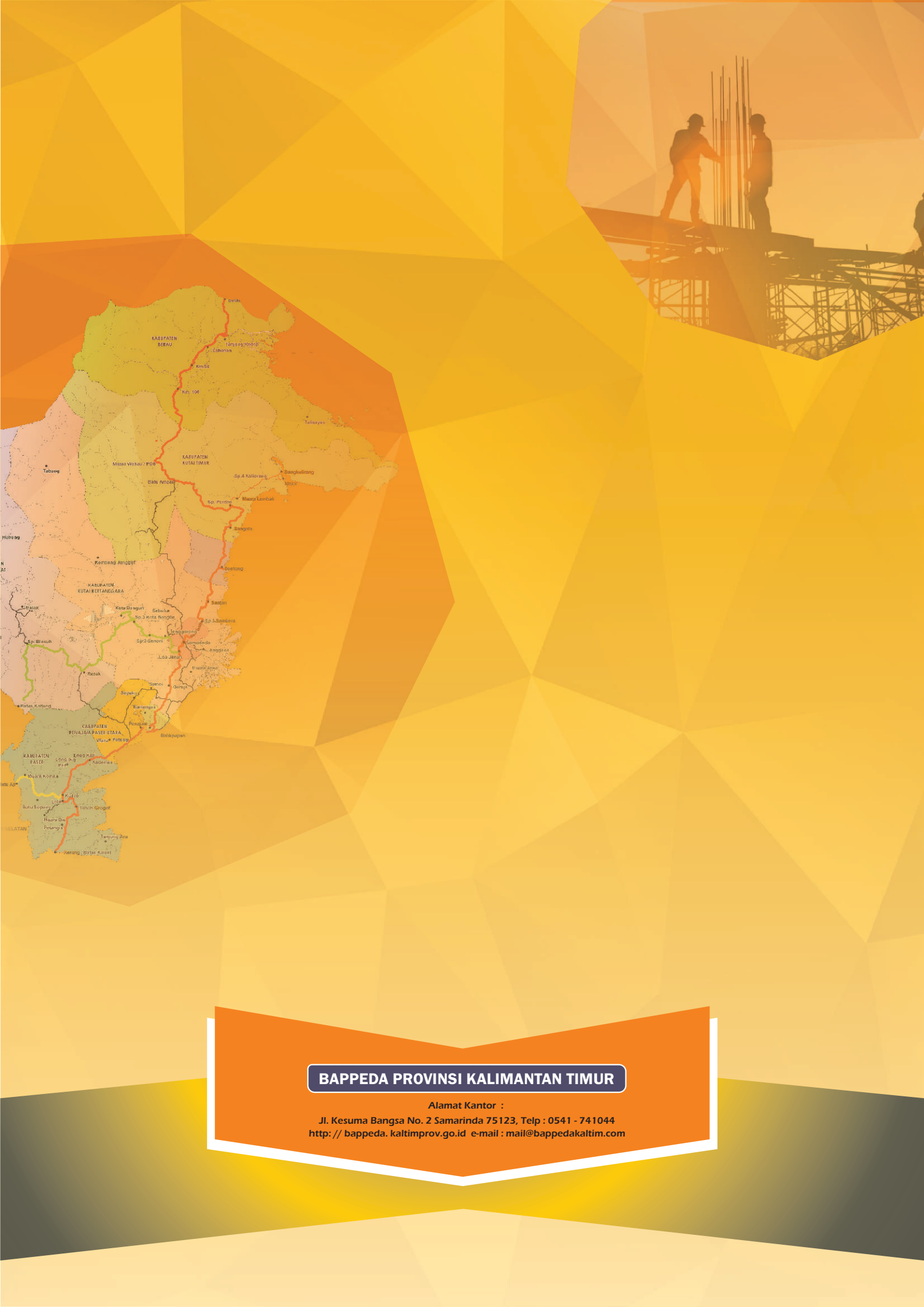
Secara rinci, terdapat peningkatan untuk setiap komponen penyusun IPM Kalimantan Timur. Pada tahun 2018, aspek kesehatan penduduk, yang ditunjukkan oleh indikator angka harapan hidup, mencapai usia 73,96 tahun. Variabel pendidikan yang diwakili oleh indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah juga mengalami peningkatan. Angka harapan lama sekolah tercatat sebesar 13,67 tahun, lebih tinggi dibandingkan angka tahun 2017 yaitu 13,49 tahun. Peningkatan juga terlihat pada indikator pendidikan lainnya, yaitu rata-rata lama sekolah, dari 9,36 tahun pada tahun 2017, meningkat menjadi 9,48 tahun pada 2018. Aspek ekonomi masyarakat diukur dengan indikator pengeluaran per kapita. Tahun 2018, pengeluaran per kapita Kalimantan Timur sebesar 11,9 juta rupiah/tahun, dimana angka tersebut lebih besar dibandingkan tahun 2017, yaitu sebesar 11,6 juta rupiah/tahun.

Berdasarkan kabupaten/kota, angka IPM tertinggi di Kalimantan Timur didominasi oleh wilayah kota, dengan IPM tertinggi adalah Kota Samarinda yaitu sebesar 79,93. Ketiga kota di Kalimantan Timur tersebut memiliki IPM yang berada di atas angka IPM Kalimantan Timur. Sedangkan IPM terendah adalah Kabupaten Mahakam Ulu sebesar 66,67.

Tabel 12. Statistik Pembangunan Manusia Kalimantan Timur, 2018

Kabupaten/Kota	IPM	Umur Harapan Hidup (tahun)	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (ribu/orang/tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Paser	71,61	72,28	12,99	8,22	10 605
Kutai Barat	70,69	72,57	12,88	8,07	9 849

Kabupaten/Kota	IPM	Umur Harapan Hidup (tahun)	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (ribu/orang/tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kutai Kartanegara	73,15	71,93	13,57	8,84	10 959
Kutai Timur	72,56	72,76	12,65	9,08	10 614
Berau	74,01	71,68	13,3	8,98	12 207
PPU	71,13	71,05	12,54	8,03	11 492
Mahakam Ulu	66,67	71,56	12,48	7,69	7 653
Balikpapan	79,81	74,18	14,12	10,65	14 557
Samarinda	79,93	73,93	14,66	10,46	14 466
Bontang	79,86	73,94	12,89	10,72	16 698
Kalimantan Timur	75,83	73,96	13,67	9,48	11 917



BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Alamat Kantor :

Jl. Kesuma Bangsa No. 2 Samarinda 75123, Telp : 0541 - 741044
<http://bappeda.kaltimprov.go.id> e-mail : mail@bappedakaltim.com